

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 Of 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

Victoria Amana Pendo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455983&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika telah diangkat dan mengangkat sumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT jika telah diangkat dan mengangkat sumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT.

Pengaturan pasal ini belum diberlakukan hingga penulisan tesis ini dibuat sehingga penulis hendak menganalisa jika pasal tersebut diberlakukan. Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pemberlakuan efektif pemberhentian sementara itu dan bagaimana status hukum serta penerapan pemberhentian sementara itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pemberhentian sementara PPAT ini akan menimbulkan kerancuan pada status PPAT itu sendiri. Pengaturan pasal ini dapat menyebabkan degradasi akta sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian Sementara PPAT.

<hr>

**ABSTRACT
**

Multiple positions of Notary outside the jurisdiction of PPAT can cause a discontinuation as PPAT. It is stipulated under Government Regulation Number 24 of 2016. Under Article 10 verse (4) Government Regulation regarding Amendment of Government Regulation Number 37 of 1998 regarding Regulation of The Position of The PPAT, stated that PPAT can

be temporarily discontinued if they have taking the oath/Notary pledge outside the jurisdiction of PPAT, if they have taking oath/ Notary pledge outside the jurisdiction of PPAT. The regulation of this Article has not been validated until this thesis completed, therefore Writer would like to analyze in case the event of the regulation officially applied. As for the research question in this thesis, that is how the temporary discontinuation can be applied effectively, and what is the effect that can be caused in the term of legal status, along with the implementation of the temporary discontinuation itself. This research used juridical method, normative with secondary data. Based on this research, Writer found that temporary discontinuation of PPAT has a tendency to create a confusion toward the status of the PPAT. The governance of this Article can lead to a deed degradation before the Decree of the temporary discontinuation established.